

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam (UU RI No. 18, 2008).

Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik. Sampah yang tergolong hayati ini untuk kota-kota besar bisa mencapai 70 % dari total sampah, dan sekitar 28 % adalah sampah non hayati yang menjadi obyek aktivitas pemulung yang cukup potensial, mulai dari sumber sampah (dari rumah-rumah) sampai ke TPA. Sisanya (sekitar 2%) tergolong B3 yang perlu dikelola tersendiri (Damanhuri, 2010).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU RI No. 18, 2008). Sebagian besar masyarakat Indonesia tumbuh dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai atau di tepi jalan, atau membakar sampah di pinggir jalan atau kebun belakang rumah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah sangat menekankan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), tetapi pendekatan ini hanya dapat berjalan apabila hal ini dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan telah berjalan sejak tahun 2007 (Australian Aid, 2013). Konsep 3R bertujuan untuk menekan volume sampah (Bappenas, 2011).

Menurut UU RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir, yang

kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sekitar 70% sampah kota di Indonesia berasal dari daerah pemukiman. Volume sampah ke TPA akan sangat berkurang bila rumah tangga memanfaatkan sampah organik untuk dibuat pupuk karena 70% sampah dari rumah tangga adalah organik dan 30% non organik (Bappenas, 2011). Apabila Program 3R berhasil dilakukan maka akan menciptakan sanitasi lingkungan yang lebih baik (Trihadiningrum, 2010).

Permasalahan sampah mencakup banyak aspek, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan inovasi-inovasi baru yang lebih memadai ditinjau dari segala aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, artinya penanganan sampah perlu dilakukan sejak dari sumbernya (Puspitawati, 2012). Masalah yang paling penting dalam kinerja pengelolaan sampah perkotaan adalah rendahnya komitmen dari Pemda untuk memprioritaskan sanitasi. Kurangnya komitmen ini berakar dari kurang memadainya sumber daya manusia (SDM), alokasi dana, dan tak adanya pengaturan kelembagaan yang tepat untuk menangani sistem pengelolaan sampah perkotaan di tingkat kota/kabupaten. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran di masyarakat, serta tak adanya penegakan hukum guna mencapai pengelolaan sampah perkotaan yang layak (Australian Aid, 2013).

Pengelolaan sampah dalam skala kecil terutama oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan pembakaran. Pengelolaan sampah dengan pembakaran dapat menimbulkan efek lanjutan bagi manusia karena terjadinya pencemaran udara dari asap dan bau. Pengelolaan sampah sebagai bahan pencemar, memang dapat dilakukan dengan berbagai cara; namun demikian, bila masih memungkinkan, upaya pencegahan jauh lebih baik dan efektif untuk

dilaksanakan. Upaya pencegahan dapat dilakukan, bila kita semua memahami dampak negatif membuang sampah sembarangan, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan manusia (Tobing, 2005).

Dalam hal cara pengelolaan sampah, hanya 24,9% rumah tangga di Indonesia yang pengelolaan sampahnya diangkut oleh petugas. Sebagian besar rumah tangga mengelola sampah dengan cara dibakar (50,1%), ditimbun dalam tanah (3,9%), dibuat kompos (0,9%), dibuang ke kali/parit/laut (10,4%), dan dibuang sembarangan (9,7%). Menurut karakteristik, proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara diangkut petugas lebih tinggi di perkotaan (46,0%) dibandingkan di perdesaan (3,4%), sedangkan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar di perdesaan (62,8%) lebih tinggi dibanding perkotaan (37,7%) (Kemenkes, 2013).

Data di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2010 menyebutkan, volume rata-rata sampah di Indonesia mencapai 200 ribu ton per hari. Jika persoalan sampah tidak segera ditangani maka pada tahun 2020 volume sampah di Indonesia meningkat lima kali lipat. Berarti, 1 juta ton tumpukan sampah dalam sehari (Bappenas, 2011).

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari 5.196.283 orang penduduk Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebesar 546.307,19 m³/hari. Volume sampah yang dihasilkan dari tahun 2012 memperlihatkan kecenderungan menurun sampai tahun 2015. Hal ini disebabkan karena faktor ketersediaan data, dimana tidak semua kabupaten/kota pada tahun 2015 ini menyampaikan data jumlah timbulan sampahnya (hanya 14 kabupaten/kota) (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2015).

Kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2015 yang menghasilkan volume sampah tertinggi, yaitu Kota Payakumbuh 314.225,00 m³/hari, Kota Pariaman 177.004,00 m³/hari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 37.403,55 m³/hari, Kabupaten Padang Pariaman dengan volume sampah 10.115.50 m³/hari dan Kota Padang dengan volume sampah 2.901,00 m³/hari (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2015).

Persoalan sampah akibat aktifitas masyarakat perlu dikelola secara optimal. Persoalan keuangan daerah dalam bentuk rendahnya kapasitas fiskal

daerah, mengakibatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah belum maksimal dan berkualitas. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 1,48 % (12 m³/hari) sedangkan rata-rata timbunan sampah yang dihasilkan 810 m³ per hari (Pemda Padang Pariaman, 2010).

Meningkatnya aktivitas masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat pula. Laju pertumbuhan sampah yang dihasilkan oleh industri, pasar dan rumah tangga tidak sejalan lagi dengan kemampuan alam untuk mereduksinya. Berdasarkan survey yang dilakukan saat ini masyarakat yang melakukan pengolahan sampah dengan metoda 3R baru 5% dari total sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga (Darnas, 2016).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016, 5 puskesmas dengan pencapaian persentase terendah pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan di tiap Puskesmas adalah Puskesmas Ulakan 11%, Puskesmas Ampalu 11,3%, Puskesmas Sicincin 11,6% , Puskesmas Ampalu 11,7% dan Puskesmas Sintuk 12,1%. Target Dinas Kesehatan adalah 86%. Pada tahun 2015 persentase pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan di Ulakan tapakis 10,96% dari target 72%.

Berdasarkan data dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 di kecamatan Ulakan Tapakis tidak terdapat TPS (Tempat Penampungan Sementara). Pengelolaan sampah rumah tangga selama ini umumnya hanya dikumpulkan , dibuat lubang dan dibakar.

Permasalahan dalam bidang pengelolaan sampah di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yakni rendahnya pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data dari Puskesmas Ulakan tahun 2016 menunjukkan bahwa 490 rumah tangga (11%) telah melakukan pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan dari 4453 rumah tangga. Pengelolaan sampah dilakukan dengan membuat lubang dan ditimbun (11%), dibakar (62%), dan dibuang sembarangan (27%)

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan lalat berkembangbiak. Lalat adalah pembawa kuman

yang menyebabkan penyakit diare bila hinggap di makanan atau peralatan makan. Berdasarkan data dari Puskesmas Ulakan pada tahun 2016 terdapat 612 kasus diare dan termasuk lima penyakit terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Ulakan

Di Kecamatan Ulakan Tapakis terdapat objek wisata pantai tiram. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) merekomendasikan Pantai Tiram menjadi salah satu destinasi wisata pilihan keluarga bagi pengunjung (<https://ayokesumbar.com/kabupaten-padang-pariaman-rekomendasikan-pantai-tiram-wisata-keluarga/>, diakses 20 Mei 2017). Sebuah kawasan wisata harus dikelola dengan baik termasuk masalah pengelolaan sampah. Sampah menjadi masalah yang dihadapi manusia jika tidak ditangani dengan baik. Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang digunakan (Slamet, 2014).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis faktor faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana distribusi pengetahuan, sikap dan peran pemerintah/tokoh masyarakat di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana distribusi frekuensi cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bagaimana hubungan pengetahuan dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bagaimana hubungan sikap dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
5. Bagaimana hubungan peran pemerintah/tokoh masyarakat dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

2. Tujuan Khusus

a. Tujuan Khusus Kuantitatif

- 1). Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan, sikap dan peran pemerintah/tokoh masyarakat di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- 2). Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- 3). Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- 4). Untuk mengetahui hubungan sikap dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- 5). Untuk mengetahui hubungan peran pemerintah/tokoh masyarakat dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

b. Tujuan Khusus Kualitatif

- 1). Untuk mengetahui komponen perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga di di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- 2). Untuk mengetahui komponen pelaksanaan (kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat) pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

- 3). Untuk mengetahui komponen pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan bagi para akademisi, khususnya yang berhubungan dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pencapaian program pengolahan sampah rumah tangga, sehingga mengurangi dampak terhadap kesehatan.

b. Bagi Kantor Lingkungan Hidup

Dapat memberikan informasi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan yang tercemar akibat dari sampah yang dihasilkan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan tindakan masyarakat agar melakukan pengolahan sampah yang berbasis masyarakat.